



## Kerangka Kerja Yurisdiksional Balikpapan untuk Kemitraan Hutan Tropis<sup>1,2</sup>

### \*\*\*KONSEP\*\*\*

#### *Mengapa memilih kerangka kerja ini?*

- Tujuan dari Kerangka Kerja Yurisdiksional Balikpapan adalah untuk memfasilitasi kerja sama antara pemerintah dengan perusahaan untuk mendorong keberlanjutan yurisdiksional dan sebagai solusi di tingkat daerah terkait deforestasi sekaligus meningkatkan keberhasilan pelaksanaan komitmen nol deforestasi oleh perusahaan.
- Mencari solusi atas permasalahan deforestasi dan degradasi hutan tropis serta mempercepat pemulihan hutan yang rusak sangat diperlukan untuk menghindarkan perubahan iklim yang membawa bahaya.
- Pemerintah di wilayah hutan tropis adalah mitra penting dalam setiap strategi yang efektif untuk mengatasi deforestasi hutan tropis dengan biaya rendah dan di skala yang tepat: di seluruh negara bagian, provinsi dan negara.
- Ikrar perusahaan terkait nol deforestasi yang berfokus pada rantai pasok mereka dan komitmen nol deforestasi yang dibuat oleh pemerintah yurisdiksi, seperti Deklarasi Rio Branco, saling mendukung satu sama lain secara substansial.
- Kerja sama antara perusahaan dan pemerintah untuk mengatasi deforestasi hutan tropis masih sangat jarang dilakukan.

#### *Prinsip Utama untuk Kemitraan yang Efektif*

- Hubungan tersebut harus saling menguntungkan: baik kawasan produsen/penghasil produk maupun perusahaan harus menjadi lebih baik dengan adanya kemitraan tersebut
- Hubungan tersebut harus berfokus pada kemajuan yang nyata dan terukur terkait upaya untuk memperlambat deforestasi sekaligus menghormati hak asasi manusia serta kepentingan masyarakat adat dan masyarakat hutan lainnya
- Hubungan tersebut harus mampu memberdayakan produsen dengan cara menyediakan alat dan kapasitas untuk meningkatkan mata pencaharian mereka dan menghasilkan komoditas yang berkelanjutan
- Hubungan tersebut harus memfasilitasi dan mendukung pemerintah daerah untuk menerapkan dan menegakkan kebijakan publik yang efektif serta rencana dan program yang selaras dengan aspirasi dari kawasan produsen/penghasil produk tersebut
- Hubungan tersebut harus mendorong dialog multi-pihak yang berkeadilan di kawasan produsen/penghasil produk untuk membangun visi bersama untuk masa depan

---

<sup>1</sup> Inisiatif Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan, Tantangan Balikpapan, Komite Pengarah Global, Produksi Pertanian dan Deforestasi Hutan Tropis dikoordinasikan oleh Sekretariat GCF dan Earth Innovation Institute

<sup>2</sup> Untuk informasi lebih lanjut, hubungi: Dan Nepstad ([dnepstad@earthinnovation.org](mailto:dnepstad@earthinnovation.org)) atau Luke Pritchard ([Luke.Pritchard@Colorado.edu](mailto:Luke.Pritchard@Colorado.edu))

- Hubungan tersebut harus mengakui dan mendorong yurisdiksi yang sedang melakukan upaya awal yang bermakna untuk menciptakan kondisi yang mendukung pemecahan masalah deforestasi

### ***Penentuan Kesuksesan***

- Suatu yurisdiksi dikatakan berhasil dalam transisi menuju keberlanjutan jika yurisdiksi tersebut melakukan langkah-langkah maju yang bermakna menuju metrik yang disepakati secara luas, kuantitatif, dan terikat waktu untuk produksi, perlindungan, dan inklusi sosial yang disesuaikan dengan masing-masing kawasan produsen
- Langkah-langkah kongkrit ini harus mencakup (a) Kehendak – pernyataan formal akan kehendak politik, (b) Kerja, tindakan nyata untuk mengurangi deforestasi, termasuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, program dan rencana yang relevan, kolaborasi dan koordinasi antara pemangku kepentingan untuk menjalankan strategi, sistem pengawasan dan (c) Hasil - pengurangan laju deforestasi yang terukur, peningkatan produksi, peningkatan dalam hal inklusi sosial dan peningkatan mata pencaharian petani kecil dan masyarakat hutan.

### ***Manfaat yang Didapatkan oleh Pemerintah***

- Rekognisi dan pengakuan atas upaya-upaya penting yang telah dilakukan untuk menuju keberlanjutan yurisdiksional
- Manfaat nyata: Setiap pemerintah memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda-beda yang dapat dibantu atau didukung oleh para mitra, misalnya akses pasar yang lebih baik atau bantuan teknis bagi petani kecil

### ***Manfaat yang Mungkin Dapat Ditawarkan oleh Pemerintah***

- Penurunan biaya dan penguatan dampak dari komitmen-komitmen pengadaan yang berkelanjutan melalui kekuatan peraturan pemerintah, penegakan hukum, kebijakan fiskal, penggalangan kekuatan, dan investasi infrastruktur.

### ***Harapan dari Perusahaan***

- Membangun dialog dengan pemerintah daerah dan sektor pertanian di wilayah-wilayah pemasok untuk membangun saling pengertian dan agenda aksi bersama
- Bertindak dengan itikad baik untuk membantu mengatasi hambatan-hambatan untuk bertransisi menuju keberlanjutan yurisdiksional berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki

### ***Keuntungan bagi Perusahaan***

- Kemitraan memperlihatkan secara jelas kepada publik komitmen perusahaan terkait keberlanjutan di dalam wilayah pemasok
- Kemitraan dapat menciptakan kondisi yang mendukung untuk memfasilitasi pelaksanaan komitmen pengadaan yang berkelanjutan



- Kemitraan dapat mengurangi biaya jangka panjang dengan menghilangkan risiko secara sistematis di seluruh wilayah pemasok, termasuk beberapa masalah yang dapat menjadi risiko di kemudian hari.

***Cara untuk Terlibat***

- Segera lihat prioritas kemitraan dan profil yurisdiksional dari Satuan Tugas Gubernur untuk Iklim dan Hutan di situs [GCFImpact.org](http://GCFImpact.org) (dalam pengembangan)
- Kunjungi pemerintah di masing-masing wilayah – lihat informasi kontak yang dapat dihubungi di [GCFImpact.org](http://GCFImpact.org) dan [Database Pengetahuan GCF](#)